

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah alat utama yang digunakan para manajer untuk menunjukkan hasil kinerja dan prestasi yang dilakukan dalam menjalani kegiatan operasional perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan alat yang digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan untuk saling terhubung (Belkaoui, 2006 dalam Prastiti, 2013).

Tujuan penting laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas masa depan perusahaan. Laporan keuangan berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi. Tujuan informasi tersebut adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis bagi para investor dan kreditor yang mencakup keputusan investasi dan kredit yang berhubungan dengan prediksi arus kas dan sumber pendanaan serta penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 1, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Laporan keuangan merupakan salah satu media untuk mengidentifikasi terjadinya manajemen laba karena informasi laba menjadi bagian yang dianggap penting dalam laporan keuangan, informasi laba dianggap sebagai representasi kinerja yang dihasilkan oleh manajemen pada periode tertentu (Handayani dan

Rachadi, 2009 dalam Prastiti, 2013). Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan sasaran utama dalam menilai kinerja dan kewajiban yang diberikan kepada manajemen. Informasi laba juga digunakan untuk mengestimasi *earnings power* yang dimiliki oleh perusahaan di tahun selanjutnya (Shita, 2011 dalam Prastiti, 2013). Perhatian lebih terhadap laba, memotivasi para manajer yang kinerjanya dinilai melalui informasi laba tersebut melakukan tindakan menyimpang, salah satunya adalah manajemen laba.

Copeland (1968) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan memaksimalkan atau meminimumkan laba untuk tujuan tertentu. Manajemen laba mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi bias dan mengurangi kredibilitas laporan keuangan karena angka yang dilaporkan tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Healy dan Wahlen, 1999).

Manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Schipper, 1989).

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa *earnings management* (Manajemen Laba) terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan.

Hal ini bertujuan untuk menyesatkan para pengguna laporan keuangan tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan.

Sebagai contoh kasus manajemen laba adalah skandal akuntansi yang dilakukan Toshiba. Seperti yang dimuat dalam money.cnn.com oleh Yan (2015),

kasus ini bermula ketika Toshiba sendiri mulai menyelidiki praktik akuntansi di divisi energi. Menurut sebuah komite independen, perusahaan menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥ 151,8 milyar (\$ 1,2 milyar) selama tujuh tahun. Kepala eksekutif Toshiba dan presiden Hisao Tanaka mengundurkan diri atas skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan. Delapan anggota dewan, termasuk wakil ketua Norio Sasaki, juga telah mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai bagian dari perombakan besar manajemen perusahaan. Akibat skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan, saham Toshiba telah turun sekitar 20% sejak awal april ketika isu-isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar perusahaan hilang sekitar ¥ 1.673 triliun (\$ 13,4 milyar) dan para analis memperkirakan saham Toshiba masih akan terus menurun. Toshiba yang merupakan salah satu merek elektronik paling dikenal di dunia serta memiliki reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan akibat skandal akuntansi yang telah dilakukan perusahaan.

Kasus yang terjadi di Indonesia yang mengungkapkan adanya fenomena praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) diantaranya PT Kimia Farma, PT. Waskita Karya dan PT. Timah Tbk. Diberitakan dalam situs www.tempo.com, pada tahun 2001 PT. Kimia Farma Tbk terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dengan melaporkan adanya laba bersih sekitar Rp 132 miliar, namun setelah dilakukan audit ulang pada tanggal 31 Desember 2001 ternyata laba perusahaan hanya sebesar Rp 99,56 miliar.

PT. Waskita Karya juga melakukan manipulasi laporan keuangan sejak pertengahan Agustus 2009. Dalam situs www.antarane.ws.com diberitakan oleh Surya (2009) PT. Waskita Karya melakukan kelebihan pencatatan laba bersih sebesar Rp 500 miliar yang diketahui saat dilakukan audit laporan keuangan menyeluruh seiring pergantian direksi pada 2008. Direksi lama PT. Waskita Karya merekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multi tahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 3 direksi PT. Waskita Karya dari pekerjaannya.

Kasus dugaan terjadinya penghindaran pajak yaitu dengan data penelitian yang mengungkapkan bahwa perusahaan PT. Darya Varia Laboratoria Tbk dan PT Merck Tbk yang memiliki omzet 1,1 Triliun melaporkan pembayaran pajak 58 Milyar dan 57 Milyar. Namun perusahaan lain seperti PT Sekar Bumi Tbk dan Kedawung Setia Industrial Tbk yang memiliki omzet sebesar 1,2 Triliun dan 1,3 Triliun melaporkan pembayaran pajak lebih rendah dari perusahaan PT. Darya Varia Laboratoria Tbk dan PT Merck Tbk., yaitu hanya sejumlah 2,3 Miliar dan 13,4 Miliar.

Pada penelitian sebelumnya bahwasannya manajemen laba dipengaruhi oleh penghindaran pajak (Wang dan Chen, 2012) dan kompensasi esekutif (Hassen, 2014). Beberapa skandal pajak yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, seperti kasus Asian Agri Group (AAG) di tahun 2012 atas 14 anak perusahaan di bawahnya guna memperkecil pembayaran pajak dari penyampaian laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2002-2005. Teknik

manajemen laba tersebut dilakukan dengan: (1) mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan; dan (2) penggelembungan biaya yang berdampak menimbulkan dampak pada kerugian pendapatan negara senilai Rp1.259.977.695.652,- yang diumumkan melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 2239 K/PID.SUS/2012 (ILRC & ICW, 2012). Selanjutnya pada tahun 2013, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) atas laporan pajak tahun 2008. TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun. Dengan adanya nilai koreksi ini, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi di bawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (Kontan, 26/03/13). Skandal pajak tersebut menjadi bukti gagalnya tata-kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan juga lemahnya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga praktik-praktik atas *tax avoidance* kembali terulang. Di sisi lain, pihak manajemen menggunakan Standar Akuntansi yang paling menguntungkan dengan pendekatan teknik manajemen laba. Beberapa kasus di atas yang menarik perhatian adalah adanya reformasi perpajakan yang berlaku efektif sejak tahun 2009 pada suatu organisasi menjadi sepenuhnya tanggung jawab pihak manajemen sebagai *agent* perusahaan meliputi perencanaan dan manajemen pajak dimana bertindak sebagai Wajib Pajak (WP) Badan. Dengan adanya reformasi perpajakan, khususnya dalam perubahan ke-4 UU Pajak Penghasilan, UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan

perubahan mendasar pada tarif PPh badan yang semula progresif menjadi tarif tunggal. Mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan telah menjadi 25% pada tahun 2010 hingga saat ini. Kondisi ini menjadi salah satu motif perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang melatarbelakangi perilaku oportunistik manajer untuk menurunkan laba yaitu *political cost hypothesis*. Menurut Watt dan Zimmerman (1986), hipotesis ini menyatakan bahwa jika laba perusahaan besar maka semakin besar pajak yang harus dibayar dan semakin tinggi perusahaan dituntut tanggungjawabnya terhadap lingkungan, otomatis biaya semakin besar (Scott, 2015).

Menurut Wang dan Chen (2012) salah satu penyebab pihak manajemen melakukan manajemen laba adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan perusahaan akan memanipulasi beban pajak penghasilan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dengan cara memanipulasi *non-taxable items*. Namun, ketika *earnings management* memanipulasi *non-taxable items* justru tidak mendatangkan keuntungan yang cukup untuk mencapai tujuan itu, perusahaan akan melalui cara tertentu untuk mengurangi pendapatan pajak terutang untuk merealisasikan target keuntungan.

Perusahaan dapat meningkatkan laba akuntansi dengan manajemen laba. Namun, konsekuensi dari manajemen laba adalah meningkatnya beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan juga melakukan *tax avoidance*. Tujuannya adalah mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Akibatnya, muncul *book-tax differences* yang semakin besar.

Faktor lain yang juga mempengaruhi manajemen laba adalah kompensasi eksekutif (*executive compensation*). Menurut Healy (1985), manajer cenderung mengelola laba untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka peroleh yang telah diatur dalam rencana kompensasi perusahaan, sehingga akan meningkatkan total kompensasi yang diperoleh. Manajemen akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba demi mendapatkan insentif lebih dari perusahaan, dengan melakukan manajemen laba maka kinerja manajer akan dikontrol oleh manajer sesuai dengan keinginan pribadinya. Maka semakin tinggi tingkat kompensasi yang direncanakan perusahaan, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya praktik manajemen laba dalam perusahaan.

Menurut teori agensi, kontrak kompensasi harus dirancang untuk menyelaraskan kepentingan manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Hubungan yang lebih kuat antara gaji eksekutif dan kinerja juga menghasilkan pemilihan dan retensi manajer yang lebih produktif. Karena faktor-faktor ini sulit untuk diamati ketika memilih manajer, memberikan eksekutif puncak dengan kompensasi terkait kinerja dapat mengurangi masalah seleksi yang merugikan (Raithatha dan Komera, 2016).

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak. Individu akan melaksanakan sesuatu jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal

tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak.

Manajemen laba sudah menjadi praktik yang dilakukan di dalam dunia bisnis. Terdapat bukti substansial di mana manajer terlibat dalam manajemen laba. Keterlibatan dalam manajemen laba muncul dari perjanjian kontraktual, pertimbangan pasar modal, dan perhatian tentang pengaturan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perilaku manajemen laba dengan melakukan penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif.

Penelitian tentang *earnings management* mungkin sudah banyak dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Ermayanti (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil terdapat hubungan positif signifikan antara Pengungkapan Sosial, Diversifikasi Perusahaan, dan Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba Perusahaan.

Pada penelitian Wang dan Chen (2012) meneliti tentang motivasi untuk penghindaran pajak di dalam manajemen laba, hasil regresi menunjukkan bahwa terjadi signifikan dengan korelasi positif di antara mereka, yang menunjukkan motivasi *tax avoidance* yang signifikan dalam *earnings management*.

Sedangkan dalam penelitian Hassen (2014) menunjukkan bahwa total kompensasi berhubungan negatif dengan nilai absolut akrual. Hasil ini menegaskan hipotesis teoritis keselarasan kepentingan eksekutif dengan pemegang saham.

Hasil penelitian yang tidak konsisten membuat peneliti tertarik untuk membahas tentang penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif terhadap *earnings management* pada penelitian terdahulu. Penelitian ini kembali menguji penelitian sejenis sebagai dasar dalam memberikan penguatan terhadap kesimpulan para peneliti.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Hassen (2014) yang meneliti hubungan antara kompensasi eksekutif dengan manajemen laba yaitu variabel independen *Executive Compensation* dan variabel dependen yaitu *Earnings Management* (EM).

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk mengadakan literatur yaitu studi yang menguji hubungan antara penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif dengan *earnings management*. Penelitian ini lebih lanjut akan meneliti hubungan penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif dengan *earnings management* dan melihat sejauh mana praktik *earnings management* itu dilakukan. Perbedaan studi ini dengan penelitian Hassen (2014) dan penelitian sebelumnya yang relevan adalah:

- (1) Pada penelitian Hassen (2014) berfokus pada kompensasi eksekutif dengan *earnings management*. Dalam studi ini menambahkan satu variabel independen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- (2) Studi Hassen (2014), membahas pengaruh *total compensation* dan *stock option compensation* dengan *earnings management*. Sementara pada studi ini total kompensasi eksekutif perusahaan dengan *earnings management*.

(3) Studi ini dilakukan dalam konteks penelitian di Indonesia, yang lingkungan institusinya berbeda dengan penelitian Hassen (2014).

(4) Di dalam studi ini penggunaan populasi adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017.

Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian adalah karena perusahaan manufaktur data laporan keuangannya lebih lengkap dan kompleks serta laporan keuangannya berhubungan dengan kriteria sampel penulis. Sumber data pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pada variabel kompensasi eksekutif, data diambil dari laporan keuangan tepatnya di bagian catatan atas laporan keuangan (CALK) perusahaan. Sedangkan pada variabel penghindaran pajak, data diambil dari laporan laba rugi perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Earnings Management* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut:

1. Perusahaan melakukan manipulasi beban pajak penghasilan untuk mengurangi pendapatan pajak terutang agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang ditargetkan.

2. Perusahaan mengurangi beban pajak yang harus dibayar, tetapi muncul *book-tax differences* yang semakin besar.
3. Para manajer melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka peroleh.
4. Para eksekutif perusahaan membuat kebijakan penghindaran pajak sebagai upaya untuk melaksanakan efisiensi pajak perusahaan dan para eksekutif menerima kompensasi yang lebih tinggi dari hasil efisiensi tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pengaruh penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif terhadap *earnings management*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah yang mempengaruhi penelitian ini adalah:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap *earnings management*?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *earnings management*?
3. Apakah penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap *earnings management*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap *earnings management*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *earnings management*.
3. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif secara simultan terhadap *earnings management*?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal mengetahui bagaimana pengaruh penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif terhadap *Earnings Management*.

2. Bagi dunia akademis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai tambahan informasi yang ada bagi civitas akademika tentang topik yang sama.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah wawasan dan pengetahuan dan menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik *earnings management*.